

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL PERSPEKTIF KEAMANAN DAN KETERTIBAN  
MASYARAKAT DI IBU KOTA NEGARA NUSANTARA  
(THE LOCAL COMMUNITY EMPOWERMENT PERSPECTIVE OF COMMUNITY  
SECURITY AND ORDER IN THE CAPITAL CITY OF NUSANTARA)**

Donald Happy Ginting<sup>1</sup> dan K. P. Suharyono S.Hadiningrat<sup>2</sup>

1. Peserta PPRA LXV 2023 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia,  
Email address [donalddginting73@gmail.com](mailto:donalddginting73@gmail.com), Telepon +6281265551994
2. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia,  
Email address [harysmwt@gmail.com](mailto:harysmwt@gmail.com), Telepon +6281254699113

**ABSTRAK** Kesenjangan sosial ekonomi antara masyarakat lokal dengan pendatang baru di IKN Nusantara berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban manakala tidak disiapkan solusi yang memadai antara lain melalui program pemberdayaan masyarakat lokal yang komprehensif dan berkelanjutan sehingga terwujud, guna melaksanakan pembangunan nasional, termasuk IKN Nusantara. Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi masyarakat lokal dengan tujuan untuk menemukan a) Pentingnya program pemberdayaan dan urgensinya ditinjau dari aspek kamtibmas; b) Upaya-upaya memberdayakan masyarakat lokal; dan c) Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat lokal di IKN Nusantara. Analisis data dilakukan secara naratif (non-numerik) menghasilkan simpulan bahwa Pemberdayaan masyarakat lokal perspektif kamtibmas di IKN Nusantara sangat urgen, antara lain meliputi program aspek mental ideologi nasional; ketrampilan; permodalan; kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan *skilling empowerment*; *upskilling empowerment*; dan *reskilling empowerment*. Faktor-faktor yang mendukung adalah semangat juang dan kerja keras; semangat gotong royong; budaya dan kearifan lokal. Faktor-faktor yang menghambatnya adalah latar belakang pendidikan rendah; tingkat sosial dan ekonomi lemah; tingkat kesehatan yang rendah; dan sumberdaya dan keuangan yang tidak memadai. Dan juga dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi; kemampuan mengelola sumber daya; kepemimpinan; partisipasi masyarakat lokal; dan tingkat keberhasilan pasca mengikuti program pemberdayaan masyarakat. Rekomendasinya adalah pemberdayaan masyarakat lokal perspektif kamtibmas agar dipersiapkan secara benar, komprehensif didukung oleh anggaran yang memadai dibarengi kebijakan afirmatif serta dijalin kolaborasi dan kerja sama kemitraan strategis semua pemangku kepentingan di IKN Nusantara, di bawah koordinasi Otoritas IKN Nusantara sebagai *leading sector*.

Kata kunci: IKN Nusantara, Pemberdayaan masyarakat, Kamtibmas

**ABSTRACT** *The socio-economic gap between local communities and new arrivals in IKN Nusantara has the potential to disrupt security and order if adequate solutions are not prepared, including through a comprehensive and sustainable local community empowerment program so that conduciveness is created to carry out national development, including IKN Nusantara. The design of this research is qualitative descriptive research to describe the condition of local communities with the aim of finding a) The importance of the empowerment program and its urgency viewed from the social security and social security aspect; b) Efforts to empower local communities; and c) Factors that support and hinder the implementation of local community empowerment in IKN Nusantara. Data analysis carried out narratively (non-numerically) resulted in the conclusion that the empowerment of local communities from a security and social security perspective in IKN Nusantara is very urgent, including, among other things, programs on mental aspects of national ideology; skills; capital; health, security, and public order. Efforts made by skilling empowerment; upskilling empowerment; and reskilling empowerment. Supporting factors are fighting spirit and hard work; spirit of mutual cooperation; local culture and wisdom. Factors that hinder this are low educational background; weak social and economic level; low level of health; and inadequate resources and finances. And also influenced by communication effectiveness; ability to manage resources; leadership; local community participation; and the level of success after participating in the community empowerment program. The recommendation is to empower local communities from a security and social security perspective so that it is prepared properly, comprehensively, supported by an adequate budget accompanied by affirmative policies and collaboration and strategic partnership cooperation between all stakeholders in IKN Nusantara, under the coordination of the IKN Nusantara Authority as the leading sector.*

*Keywords: Capital city of Nusantara, Community Empowerment, Community security and order.*

## PENDAHULUAN

Pemerataan dan keadilan menjadi hal sangat penting dalam mewujudkan pembangunan nasional di segala bidang, baik aspek trigatra maupun pancagatra. Kemajuan pembangunan yang berbeda-beda dapat mengakibatkan kesenjangan (*gap*) antar individu, kelompok maupun antar daerah; di mana berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial, disharmoni, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (*kamtibmas*) bahkan disintegrasi. Kesenjangan sosial dan ekonomi antara warga negara yang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan, antara warga yang kaya dengan yang miskin maupun status sosial yang berbeda sangat tajam akan memicu timbulnya permasalahan sosial seperti kecemburuan, konflik sosial, permusuhan maupun disintegrasi bangsa. Kesenjangan antara kondisi saat ini (*das sein*) dengan kondisi yang diharapkan (*das sollen*) menjadi *area of concerned* yang harus dicarikan solusi terbaik agar dampak yang ditimbulkannya dapat dikendalikan sedemikian rupa sehingga kondisi dalam masyarakat tetap terjaga.

Presiden Joko Widodo (2021) mengingatkan bahwa perencanaan pemindahan Ibu Kota Negara/IKN jangan membuat masyarakat terasing di kampungnya sendiri dan jangan silau terhadap kemajuan teknologi yang tidak diaplikasikan secara integral dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Jadi pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara bukan sekedar pembangun fisik namun

harus berorientasi pada pembangun sosial yang berkelanjutan sesuai Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku. Pemindahan pusat pemerintahan diharapkan mampu mengatasi kesenjangan sosial, ekonomi dan kemajuan pembangunan antara Kawasan Indonesia Barat dengan Kawasan Indonesia Timur.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 mengenai Ibu Kota Negara, ditegaskan bahwa IKN Nusantara diharapkan menjadi kota dunia untuk semua yang bertujuan untuk menjadi a) kota berkelanjutan di dunia; b) penggerak perekonomian nasional Indonesia di masa depan; dan c) simbol identitas nasional yang merepresentasikan dan menggambarkan keberagaman bangsa dan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UD NRI 1945).

Kondisi sosial yang dinamis dan beragam yang ada pada masyarakat lokal di wilayah IKN Nusantara saat ini merupakan tantangan tersendiri dalam pembangunan sosial, terlebih kondisi mereka relatif masih tertinggal dibandingkan dengan calon pendatang dari aparat pemerintah pusat maupun perwakilan negara asing beserta keluarganya. Data Badan Pusat Statistik/BPS Penajam Paser Utara (2022) menyebutkan bahwa mata pencaharian penduduk di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mayoritas petani sawit, karet, padi dan palawija. Sedangkan mata pencaharian penduduk di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara menurut data BPS Kutai Kartanegara mayoritas adalah

petani padi, palawija, sawit maupun perikanan. Di kedua kecamatan tersebut juga banyak usaha pertambangan batu bara, perkebunan kelapa sawit maupun minyak dan gas bumi yang dikelola oleh perusahaan asing maupun PERTAMINA.

Dewi, dkk. (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa tingkat kesiapan masyarakat di Kec. Sepaku dan Kec. Samboja masih rendah dalam merespons rencana pemindahan IKN, sehingga perlu ditingkatkan antara lain melalui sosialisasi yang masif. Andi Widjajanto dalam Hadiningrat (2022) menegaskan bahwa integrasi penuh antara masyarakat lokal dan pendatang di IKN Nusantara harus dipersiapkan dengan benar dan diperlukan program-program pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan fisibilitas tercapainya target-target pembangunan nasional.

Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat lokal agar kapabilitas mereka meningkat dan mampu menyesuaikan dengan kemajuan pembangunan IKN Nusantara. Bukan sebaliknya, mereka menjadi terpinggirkan dan hanya sebagai penonton akibat tergusur oleh pembangunan IKN Nusantara. Pemberdayaan masyarakat lokal harus dipersiapkan secara dini agar mereka berdaya dalam mendukung kekondusifan kamtibmas. Hal ini sangat penting mengingat kondisi kamtibmas merupakan prasyarat dalam melaksanakan pembangunan nasional termasuk pembangunan IKN Nusantara guna mewujudkan kepentingan nasional, baik aspek kesejahteraan (*prosperity*) maupun keamanan (*security*).

Mengacu pada kesenjangan di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah urgensi pemberdayaan masyarakat lokal ditinjau dari aspek keamanan dan ketertiban masyarakat di IKN Nusantara?”. Dengan pertanyaan-pertanyaan kajian, sebagai berikut a) Urgensi dan Jenis program pemberdayaan masyarakat lokal seperti apakah yang sesuai dengan kondisi masyarakat lokal agar meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kapabilitas dalam menghadapi pembangunan IKN Nusantara?; b) Bagaimanakah upaya pemberdayaan masyarakat lokal di IKN Nusantara agar dapat diterima oleh masyarakat lokal sehingga dalam pembangunan IKN Nusantara tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat?; dan c) Faktor-faktor apakah yang mendukung dan yang tidak mendukung (menghambat) implementasi pemberdayaan masyarakat lokal di IKN Nusantara ditinjau dari aspek keamanan dan ketertiban masyarakat?

Dengan tujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan a) Pentingnya dan jenis program pemberdayaan masyarakat lokal ditinjau dari aspek keamanan dan ketertiban masyarakat di IKN Nusantara; b) Upaya-upaya melakukan pemberdayaan masyarakat lokal ditinjau dari aspek keamanan dan ketertiban masyarakat di IKN Nusantara; dan c) Faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat implementasi pemberdayaan masyarakat lokal di IKN Nusantara ditinjau dari aspek keamanan dan ketertiban masyarakat.

Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif (Arikunto,2011), untuk menggambarkan dan menganalisis variabel-variabel yang terkait dengan urgensi pemberdayaan masyarakat lokal di IKN Nusantara perspektif keamanan dan ketertiban masyarakat; kemudian dipaparkan secara naratif atau *non-numerik* berdasarkan fakta dan data.

Data yang dikumpulkan melalui data publikasi oleh kementerian/lembaga terkait maupun paparan dari Badan Otorita IKN Nusantara dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan fenomena mengenai urgensi pemberdayaan masyarakat lokal di IKN Nusantara perspektif keamanan dan ketertiban masyarakat.

Keterbaharuan atau *Novelty* penelitian ini adalah menemukan menemukan urgensi pemberdayaan masyarakat lokal di IKN Nusantara ditinjau dari aspek keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), yang merupakan hal baru. Pemberdayaan masyarakat dalam kaitannya dengan kamtibmas merupakan hal sangat penting (*urgent*) dan mendesak untuk dilaksanakan oleh pemerintah (dalam hal ini Badan Otorita IKN Nusantara) agar proses pembangunan berjalan lancar, aman dan mampu menyejahterakan rakyat dan bangsa Indonesia.

Pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara di wilayah Kalimantan Timur menurut penelitian Hadinagoro (2020) mengenai Analisis Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur Terhadap Pembangunan

Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur ditemukan adanya dampak positif dari pemindahan IKN terhadap performa ekonomi dan sosial; namun berdampak negatif terhadap performa lingkungan. Sehingga diperlukan langkah-langkah kongkret untuk melakukan *corrective action* agar lingkungan dapat dijaga kelestariannya.

Kemudian, penelitian Dewi, dkk. (2020) menyimpulkan bahwa pada umumnya masyarakat lokal di wilayah Kec.Sepaku Kab. Penajam Paser Utara dan wilayah Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara menganggap belum ada upaya untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara. Mereka tidak khawatir, tetapi sadar bahwa akan ada dampak kepada mereka baik dampak ekonomi dan sosial yang akan timbul. Namun, mereka tidak tahu harus berbuat apa karena pengetahuan dan kemampuannya terbatas sehingga tidak tahu kontribusi apa yang harus diberikan.

Hambatan-hambatan yang dihadapi sangat kompleks karena mereka tidak tahu upaya-upaya apa yang harus dilakukan, rendahnya pendidikan, kualitas sumber daya manusia lokal yang sangat terbatas maupun data yang sangat terbatas. Jangankan memikirkan ha-hal yang akan terjadi di masa depan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja mereka harus bekerja keras dalam berbagai keterbatasan. Kondisi yang demikian harus menjadi perhatian pemerintah khususnya Badan Otorita IKN Nusantara dalam melakukan pembangunan fisik maupun non-fisik agar mereka *survive* menjalani kehidupan di Ibu Kota Negara.

Jika tidak dipersiapkan dengan baik, mereka berpotensi menjadi penyandang masalah sosial di Ibu Kota Negara. Hal ini seharusnya dapat dihindari atau diminimalisir agar mereka menikmati kemajuan pembangunan IKN Nusantara melalui pemberdayaan masyarakat.

Dalam menyelenggarakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat harus direncanakan secara matang dan diarahkan untuk :

- memperbaiki (*to improve*) kondisi sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik;
- menemukan dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat dilakukan sesuai dengan prinsip membantu masyarakat untuk membantu dirinya sendiri (*to help the community to help themselves*); serta menggerakkan peran serta aktif dalam memecahkan berbagai permasalahan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. (Suharto, 2005)

Pembangunan IKN hendaknya berdasarkan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Sekaligus sebagai simbol identitas nasional dari Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menerapkan prinsip dan paradigma pembangunan berkelanjutan. IKN diharapkan menjadi Kota Cerdas (*Smart City*) yang didesain multi-fungsi berbasis pada penggunaan teknologi ICT (*Information and Communication Technology*) di Era Revolusi Industri 4.0 maupun Society 5.0. Hal tersebut sejalan dengan hasil

penelitian Battyl (2012) dan kawan-kawan yang menemukan bahwa *smart city* mempunyai fungsi-fungsi sebagai *smart living, smart people, smart environment, smart economy, smart governance, and smart mobility*.

*Smart city* dalam perspektif keamanan dan ketertiban (kamtibmas) harus mampu mengedepankan terciptanya kondisi dinamis yang aman dan kondusif dalam masyarakat sehingga proses dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat diwujudkan dengan baik dan sukses tanpa gangguan yang berarti.

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa kamtibmas merupakan suatu kondisi masyarakat yang bersifat dinamis sebagai salah satu prasyarat untuk terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam kerangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya kondisi keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum maupun terbinanya ketenteraman. Di dalamnya terkandung kemampuan untuk membina dan mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat di dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum maupun berbagai gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan variabel penelitian mengikuti

alur pikir adanya kesenjangan (*gap*) ekonomi dan sosial antara masyarakat lokal dan pendatang baru di IKN Nusantara yang berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial, disharmoni, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (*kamtibmas*) bahkan disintegrasi. Kesenjangan antara kondisi saat ini (*das sein*) dengan kondisi yang diharapkan (*das sollen*) menjadi *area of concerned* yang harus dicarikan solusi terbaik agar dampak yang ditimbulkannya dapat dikendalikan sedemikian rupa sehingga kekondusifan dalam masyarakat tetap terjaga.

Secara skematis, alur pikir penelitian sebagaimana tersebut di bawah ini.



Sumber : Hasil analisis penulis (2023)

Gambar 01 Alur Pikir Penelitian

Selanjutnya, pembahasan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif terhadap variabel-variabel penelitian dan disajikan sebagai berikut :

1. Pentingnya dan jenis program pemberdayaan

masyarakat lokal ditinjau dari aspek keamanan dan ketertiban masyarakat di IKN Nusantara.

Kondisi saat ini, Pelatihan yang sudah dilakukan adalah a) Pelatihan Hidroponik berhasil meningkatkan ekonomi masyarakat lokal khususnya masyarakat Desa Sukaraja, Bumi Harapan, Sukomulyo, Bukit Raya dan Kelurahan Maridan dengan omset 3-4 Juta Rupiah; b) Percepatan *Smart Village* penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bukit Raya. dan memberikan kemudahan dalam pembayaran di wilayah Kecamatan Sepaku yang dilakukan oleh Badan Otorita IKN bersama PT Telkom Regional VI dan Kaltimara.



Sumber : Presentasi Sekretaris Otorita IKN

Nusantara tanggal 11 April 2023

Gambar 02 Kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat Desa di IKN Nusantara





Sumber : Presentasi Sekretaris Otorita IKN

Nusantara tanggal 11 April 2023

Gambar 03 Kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat Desa di IKN Nusantara

Pemberdayaan tersebut belum memadai untuk menjadikan masyarakat lokal menjadi berdaya. Oleh karena itu, diperlukan program yang komprehensif menjangkau semua sasaran yang benar-benar membutuhkan sebagai pribadi maupun kelompok rentan. Pembiayaannya pun harus disiapkan sedemikian rupa, bukan sekedar pelatihan-pelatihan sederhana. Namun harus dipersiapkan pemberdayaan masyarakat yang mampu memberikan *upskilling* dan *reskilling* yang *matching* dengan tuntutan zaman.

Pemberdayaan masyarakat lokal di IKN Nusantara dimaksudkan untuk memberikan daya atau kemampuan kepada masyarakat lokal agar mereka mampu menghidupi dirinya maupun keluarganya, sehingga mereka siap berkontribusi di IKN Nusantara. Kondisi mereka saat ini relatif tertinggal dibandingkan dengan para pendatang baru dari pemerintahan pusat. Mereka tidak akan mampu berkompetisi dengan para pendatang baru, jika pemerintah (OIKN) tidak hadir. Hal

tersebut sangat penting dan mendesak untuk melakukan program-program pemberdayaan secara bertahap dan, terus-menerus. Pun, harus diikuti dengan *affirmative policy* (kebijakan keberpihakan) kepada masyarakat lokal dengan prioritas-prioritas jangka pendek, menengah dan panjang.

Pemberdayaan masyarakat lokal mempunyai tujuan untuk memperkuat daya masyarakat, terutama kepada kelompok rentan atau yang tidak mempunyai kekuatan atau daya. Setidaknya kepada kelompok lemah yang: a) secara struktural memang tidak berdaya karena terdampak oleh keadaan gender, kelas maupun etnis; b) secara khusus tidak mempunyai daya, seperti anak-anak, pemuda penyandang cacat, masyarakat terasing maupun manula; dan c) secara personal, mengalami permasalahan pribadi maupun keluarga. (Suharto,2005)

Pemberdayaan masyarakat lokal di IKN Nusantara menjadi hal yang sangat *urgen*/penting dan mendesak untuk dilakukan mengingat kondisi mereka belum ada upaya mempersiapkan diri, sebagaimana hasil penelitian dari Dewi, dkk. (2020) bahwa pada umumnya masyarakat lokal di wilayah Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara dan wilayah Kecamatan Samboja Kab. Kutai Kartanegara menganggap belum ada upaya untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara. Mereka tidak khawatir, tetapi sadar bahwa akan ada dampak kepada mereka baik dampak ekonomi dan sosial yang akan timbul. Namun, mereka tidak

tahu harus berbuat apa karena pengetahuan dan kemampuannya terbatas sehingga tidak tahu kontribusi apa yang harus diberikan.

Hambatan-hambatan yang dihadapi sangat kompleks karena mereka tidak tahu upaya-upaya apa yang harus dilakukan, rendahnya pendidikan, kualitas sumber daya manusia lokal yang sangat terbatas maupun keterbatasan dana. Jangankan memikirkan hal-hal yang akan terjadi di masa depan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja mereka harus bekerja keras dalam berbagai keterbatasan.

Kondisi yang demikian harus menjadi perhatian pemerintah khususnya Otorita IKN Nusantara dalam melakukan pembangunan fisik maupun non-fisik agar mereka *survive* menjalani kehidupan di Ibu Kota Negara. Jika tidak dipersiapkan dengan baik, mereka berpotensi menjadi penyandang masalah sosial di Ibu Kota Negara. Hal ini seharusnya dapat dihindari atau diminimalisir oleh Badan OIKN agar mereka dapat menikmati kemajuan pembangunan IKN Nusantara.

Program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat harus direncanakan secara matang dan diarahkan untuk a) memperbaiki (*to improve*) kondisi sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik; b) menemukan dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat guna mencukupi kebutuhan-kebutuhannya; sehingga dapat diwujudkan pemberdayaan masyarakat sesuai prinsip

membantu masyarakat untuk membantu dirinya sendiri (*to help the community to help themselves*); serta menggerakkan peran serta aktif dalam memecahkan berbagai permasalahan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya (Adi,2008).

Di samping memberi manfaat untuk diri, keluarga dan masyarakat diharapkan melalui program pemberdayaan masyarakat lokal yang tepat akan membawa pengaruh positif bagi kemajuan bangsa dan negara, khususnya pembangunan IKN Nusantara. Sebaliknya, jika pemberdayaan masyarakat lokal gagal maka berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial, disharmoni, gangguan kamtibmas bahkan mungkin disintegrasi dimana sumber kekayaan Kalimantan Timur sangat besar. Oleh karenanya, mereka harus diberdayakan secara optimal agar dapat menjalani kehidupan baru di lingkungan IKN Nusantara yang serba modern, yang tidak mereka bayangkan sebelumnya. Perubahan yang revolusioner dari kehidupan sebelumnya dapat memicu kepanikan karena mereka tidak siap untuk menghadapinya. Disinilah urgensi atau pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal untuk meningkatkan daya (kemampuan) mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.



Mengacu pada hal-hal tersebut di atas, maka jenis-jenis program pemberdayaan masyarakat lokal perspektif kamtibmas di IKN Nusantara dikelompokkan sebagai berikut:

NO	Jenis Program Pemberdayaan Masyarakat	Tujuan
1.	Aspek Mental Ideologi Nasional : -Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan,yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika.	- Meningkatkan literasi nilai-nilai kebangsaan bagi masyarakat lokal IKN Nusantara
2	Aspek Ketrampilan a. Pelatihan ketrampilan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi b. Pelatihan ketrampilan Bertani, Berkebun, Beternak dan Budi daya perikanan. c. Pelatihan ketrampilan Informatika & Telekomunikasi (IT) Ekonomi Digital d. Pelatihan Industri rumahan ( <i>home industry</i> ) e. Pelatihan Jasa dan kampung wisata f. Pelatihan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produksi g. Pelatihan teknisi AC, listrik, bengkel dan pertukangan. h. Pelatihan ketrampilan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi i. Pelatihan ketrampilan Bertani, Berkebun, Beternak dan Budi daya perikanan.	- Meningkatkan kualitas ketrampilan SDM dan kualitas barang, jasa dan pelayanan
	j. Pelatihan teknisi AC, listrik, bengkel dan pertukangan. k. Pelatihan ketrampilan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi l. Pelatihan ketrampilan Bertani, Berkebun, Beternak dan Budi daya perikanan. m. Pelatihan ketrampilan Informatika & Telekomunikasi (IT) Ekonomi Digital n. Pelatihan Industri rumahan ( <i>home industry</i> )	

	o. Pelatihan Jasa dan kampung wisata p. Pelatihan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produksi q. Pelatihan teknisi listrik, AC, perbengkelan, pertukangan. r. Pelatihan usaha kuliner, tata boga dan tata busana s. Pelatihan strategi pemasaran digital t. Pelatihan Teknik computer dan disain grafis u. Pelatihan tata Kelola BUMDes v. Pelatihan pelestarian budaya & sanggar budaya	
3	Aspek Permodalan &Bisnis	- Meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
	a. Bantuan Modal Bergulir b. Kredit Usaha Kecil, Mikro & Koperasi c. Penguatan BUMDes berbasis digital.	
4	Aspek Kesehatan a.Posyandu (pos pelayanan kesehatan terpadu) b. Polindes (Pos bersalin desa) c. Pengobatan gratis	- Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
5	Aspek Kamtibmas 1) Penyuluhan pentingnya Kamtibmas 2) Kolaborasi wujudkan kamtibmas kondusif 3) Siskamling	- Meningkatkan kesadaran dan peranserta masyarakat dalam kamtibmas.

Transformasi kehidupan dari masyarakat pedesaan menjadi masyarakat perkotaan, terlebih Ibu Kota Negara yang serba modern memerlukan kerja cerdas, kerja keras dan kerja ikhlas secara gotong royong melibatkan peran serta aktif semua elemen bangsa. IKN Nusantara akan menjadi *centre of gravity* bagi bangsa dan negara Republik Indonesia, juga bagi dunia internasional. Hal ini sejalan dengan tujuan IKN Nusantara a) menjadi kota berkelanjutan di dunia; b) sebagai penggerak

ekonomi Indonesia di masa depan; dan c) menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.<sup>1</sup>

Pemberdayaan masyarakat agar dapat diterima oleh masyarakat lokal di lingkungan IKN Nusantara harus memperhatikan kondisi sekarang, aspirasi mereka maupun proyeksi kebutuhan yang akan datang agar mereka memiliki kemampuan, kapabilitas yang memadai untuk diri maupun keluarganya agar dapat berkontribusi dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Sehingga mereka dapat menjadi warga IKN Nusantara yang baik, cerdas dan produktif di dalam berkontribusi kepada bangsa dan negara. Bukan justru sebaiknya terpinggirkan karena terdampak negatif dari pembangunan IKN. Kondisi yang demikian berpotensi memicu kecemburuan sosial, disharmoni, konflik, gangguan keamanan dan ketertiban bahkan disintegrasi. Hal ini akan memperlemah ketahanan nasional dan mengancam eksistensi dan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara bersamaan, Pemberdayaan masyarakat lokal dilaksanakan sekaligus untuk mempersiapkan mereka menjalani kehidupan baru di IKN Nusantara, menghadapi Bonus Demografi tahun 2030 maupun menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Juga untuk mencapai 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* yaitu 1) Tanpa

Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat lokal dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu *Skilling, Upskilling and reskilling empowerment*.

1) *Skilling* merupakan upaya untuk memberikan ketrampilan bagi masyarakat lokal yang belum memiliki ketrampilan tertentu. Di mana, *skill* merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu yang berasal dari latihan, pendidikan maupun pengalaman. Misalnya ketrampilan wirausaha, desain grafis, komputer, teknisi listrik, pertukangan dan lain-lain bagi angkatan kerja maupun masyarakat yang belum memiliki ketrampilan tertentu. Perlu diperhatikan juga bakat atau minat dalam mempersiapkan kompetensi, di samping yang dibutuhkan lapangan kerja. Jenis ketrampilan (*skill*) yang dapat dikembangkan mencakup *hard skill, soft skill, upskilling* dan *reskilling* di mana indikator-

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

indikasinya berupa *technical skill*, *management skill*, *entrepreneur skill* dan *personal skill* yang mempengaruhi langsung motivasi, keahlian dan pengalaman seseorang.

- 2) *Upskilling* merupakan upaya memberikan ketrampilan seseorang untuk mengisi pekerjaan yang lebih tinggi pada saat ini maupun masa depan. Merupakan ketrampilan tambahan untuk meningkatkan kapasitas seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu yang lebih tinggi. Dalam hal ini, seseorang sudah memiliki pengetahuan dasar dan memerlukan beberapa keterampilan lagi untuk melakukan pekerjaannya dengan lebih tinggi. Dengan *upskilling* akan membantu menutupi kesenjangan (*gap*) ketrampilan sebelumnya dengan pekerjaan baru yang akan diemban. Mereka memerlukan kapasitas, ketrampilan baru agar sukses mengerjakan tugas-tugas baru. *Upskilling* berkaitan dengan seseorang mendapatkan ketrampilan baru agar lebih siap dalam melaksanakan pekerjaannya lebih efektif, efisien, atau dengan cara yang lebih modern. *Upskilling* bagi seseorang diperlukan untuk meningkatkan keterampilan baru agar mampu beradaptasi dengan perubahan sehingga mampu melaksanakan peranan yang baru.
- 3) *Reskilling* merupakan upaya memberikan ketrampilan baru kepada masyarakat yang keterampilannya sudah tidak cocok dan harus disiapkan ketrampilan baru. Misalnya

ketrampilan yang semula adalah berkebun kelapa sawit, karena lokasinya tergusur oleh IKN Nusantara maka perlu ketrampilan baru, misal menjadi pedagang. *Reskilling* merupakan teknik pengembangan seseorang atau masyarakat dengan cara memberikan pelatihan ketrampilan baru untuk melakukan pekerjaan yang berbeda dengan sebelumnya. Kemampuan baru tersebut untuk mengerjakan hal-hal yang baru yang berbeda dengan sebelumnya. *Reskilling* menyiapkan seseorang untuk beralih ke pekerjaan/profesi baru akibat adanya perubahan. *Upskilling* maupun *reskilling* yang dilakukan dengan benar akan memberikan manfaat bagi seseorang maupun masyarakat dalam menjalani kehidupannya, terlebih masyarakat lokal di IKN Nusantara yang masih relatif tertinggal. Dengan *upskilling* maupun *reskilling* ini diharapkan mereka akan memiliki kemampuan yang memadai, produktif dan mampu berkontribusi bagi pembangunan IKN Nusantara. Setidaknya mereka dapat menghidupi diri sendiri dan keluarganya.

Sangat naif bagi masyarakat lokal untuk dapat menjadi ASN maupun pegawai di Badan Otorita IKN Nusantara jika standar yang diterapkan sangat tinggi bagi masyarakat lokal. Sehingga perlu *affirmative policy* (kebijakan keberpihakan) bagi masyarakat lokal untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Jika tidak, maka berpotensi menimbulkan masalah sosial

seperti kecemburuan, disharmoni, gangguan kamtibmas, kriminal bahkan disintegrasi.

3. Faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat implementasi pemberdayaan masyarakat lokal di IKN Nusantara ditinjau dari aspek keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Pemberdayaan masyarakat lokal diarahkan untuk membuat mereka berdaya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi diri dan keluarganya. Tercukupinya pangan, sandang dan papan menjadi prioritas utamanya. Kebutuhan dasar ini harus menjadi prioritas agar mereka hidup layak sehingga mereka dapat berkontribusi dalam pembangunan IKN Nusantara. Mereka jangan sampai hanya sebagai penonton di kampungnya sendiri, apalagi tergusur ke daerah lain. Dalam hal ini, pemerintah Otorita IKN Nusantara menjadi *leading sector* dalam mengkoordinasikan semua program pemberdayaan masyarakat lokal bersama para pemangku kepentingan lainnya menggunakan model *pentha helix*. Yaitu kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, masyarakat dan media. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat lokal hendaknya dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pembangunan fisik sehingga nanti pada saat selesainya pembangunan fisik tersebut kondisi masyarakat lokal sudah diberdayakan. Termasuk, memberikan kesempatan kepada mereka untuk bekerja dalam pembangunan fisik IKN Nusantara. Jangan sampai mereka menjadi penonton karena tidak memiliki akses ke proyek

pembangunan IKN Nusantara. Jika ini terjadi maka akan muncul kecemburuan sosial karena para pekerja proyek IKN Nusantara didatangkan dari luar daerah dan tinggal di dalam teritorial proyek tersebut.

Tantangan untuk melibatkan masyarakat lokal pun tidak mudah mengingat kondisi mereka relatif masih tertinggal, sehingga harus ada *affirmative policy* (kebijakan keberpihakan) kepada mereka. Misalnya, standar penerimaan pekerja di proyek maupun pegawai baru Badan Otorita IKN Nusantara hendaknya memberikan akses yang luas untuk mereka; dimana mereka tidak serta merta berkompetisi secara terbuka dengan para calon pekerja di proyek IKN Nusantara maupun calon pegawai Badan Otorita IKN Nusantara. Misalnya, untuk masyarakat lokal diberi kuota tertentu untuk berkompetisi sesama masyarakat lokal sehingga sebanding.

Strategi mengembangkan partisipasi masyarakat paternalistik dapat dilakukan melalui para tokoh masyarakat dan tokoh agama; dimana mereka akan diikuti perilakunya. Strategi ini akan sangat efektif untuk keberhasilan program-program pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat akan mendukung ketangguhan ketahanan nasional, dan begitu pula sebaliknya. Berbicara Ketahanan Nasional berkaitan dengan suatu kondisi Bangsa Indonesia yang dinamis mencakup seluruh aspek kehidupan yang terintegrasi berupa keuletan dan ketangguhan mengembangkan kekuatan nasional, guna mengatasi berbagai tantangan, ancaman,

gangguan dan hambatan yang datang dari dalam maupun luar negeri demi menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara dan menjamin integritas nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang dikenal dengan astagatra yang mencakup trigatra (geografi, Sumber Kekayaan Alam, demografi) dan pancagatra (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya (termasuk teknologi) dan pertahanan & keamanan) saling berpengaruh satu dengan yang lainnya. Hal tersebut harus didayagunakan secara optimal demi kepentingan bangsa dan negara melalui penguatan komitmen kebangsaan agar keuletan dan ketangguhan bangsa menjadi semakin kuat untuk menangkai berbagai kemungkinan dari dalam maupun luar negeri yang akan mengganggu eksistensi dan stabilitas nasional.

Ketidakberdayaan masyarakat lokal di wilayah IKN Nusantara berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, salah satu diantaranya gangguan kamtibmas. Hal tersebut merupakan kondisi dinamis dalam masyarakat yang senantiasa berubah dan menjadi salah satu prasyarat untuk menjalankan pembangunan nasional. Kamtibmas yang kondusif dan penegakkan hukum yang berkeadilan akan menjamin terwujudnya ketenteraman dalam masyarakat sehingga pembangunan IKN Nusantara maupun pembangunan nasional dapat dilakukan dengan baik guna mencapai cita-cita dan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

POLRI sebagai kekuatan utama di dalam

mewujudkan kamtibmas yang kondusif harus mampu mengembangkan kepedulian dan peran serta aktif masyarakat agar memiliki kemampuan yang memadai untuk menangkai, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, dalam hal ini masyarakat lokal di wilayah IKN Nusantara. Di sinilah pentingnya, upaya-upaya pemberdayaan masyarakat lokal berbasis kamtibmas agar dapat mewujudkan kekondusifan dalam masyarakat secara gotong royong. Sebagai alat negara, POLRI yang menjalankan fungsi kamtibmas memiliki peranan menjadi kekuatan utama dengan rakyat menjadi kekuatan pendukungnya. Dimana, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Guna menjalankan peranannya, POLRI memiliki tugas pokok untuk a) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat; b) memelihara kamtibmas; dan c) menegakkan hukum. Kamtibmas yang kondusif juga merupakan salah satu parameter dari ketahanan nasional, dalam arti semakin kondusif situasi kamtibmas maka akan memantapkan ketahanan nasional. Kamtibmas yang kondusif menjadi prasyarat dalam pembangunan nasional. Di dalamnya terkandung maksud bahwa tanpa kamtibmas yang kondusif maka pembangunan IKN Nusantara tidak akan berhasil.

Aspek kamtibmas akan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan IKN Nusantara pada khususnya dan pembangunan

nasional pada umumnya. Tanpa kamtibmas yang kondusif kita akan susah payah melaksanakan pembangunan baik fisik maupun non-fisik. Dalam kondisi kamtibmas kondusif saja, banyak tantangan untuk melaksanakan pembangunan yang efektif, efisien dan menyejahterakan rakyat; apalagi kondisi kamtibmas tidak kondusif. Oleh karena itu, setiap elemen anak bangsa harus bersama-sama menciptakan kondisi kamtibmas yang kondusif agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik dan sukses. Kita semua prihatin, bahwa masih ada kasus gangguan kamtibmas di sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang hingga kini belum ada solusi terbaik. Bagaimana kita bisa membangun, kalau kondisi kamtibmas tidak kondusif; bahkan sangat membahayakan bagi keselamatan jiwa manusia. Peran serta masyarakat secara pribadi maupun kelompok menjadi hal yang penting dalam mewujudkan kondisi kamtibmas yang kondusif sebagai prasyarat melaksanakan pembangunan IKN Nusantara maupun pembangunan nasional. Perlu dikembangkan sistem kamtibmas swakarsa yang dimotori oleh POLRI untuk mewujudkan kondisi kamtibmas di lingkungannya. Hal ini sejalan dengan *community participation theory* (teori partisipasi masyarakat) yang menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Guna membangun kemampuan masyarakat dalam mengorganisasikan dan berpartisipasi dalam setiap proses pengambilan keputusan, serta

meningkatkan kemandirian dan pemahaman masyarakat tentang peranan mereka dalam memecahkan masalah sosial.(Suharto,2005).

Berkaitan dengan, adanya *gap*/kesenjangan sosial dan ekonomi pada masyarakat lokal dengan calon pendatang dari pemerintahan pusat di IKN Nusantara berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas, sehingga perlu langkah-langkah preventif dan antisipatif yang memadai. Jangan sampai mereka menjadi semakin tertinggal dengan adanya pembangunan IKN Nusantara. IKN Nusantara yang dibangun di kampung mereka diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka masyarakat lokal maupun seluruh bangsa Indonesia. Dalam memberdayakan masyarakat lokal dengan latar belakang yang ada saat ini, tidak dapat dilakukan secara revolusioner. Latar belakang kehidupan dan pendidikannya yang relatif masih tertinggal sehingga diperlukan program pemberdayaan secara bertahap, bertingkat dan berkelanjutan.

Dengan latar belakang pendidikan yang reaktif rendah pada masyarakat lokal harus ada upaya yang *out of the box* untuk mempersiapkan mereka agar mereka memiliki kapabilitas yang memadai, setidaknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Harus dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pembangunan fisik IKN Nusantara. Jika mereka tidak diberdayakan secara benar akan dapat menimbulkan masalah sosial seperti kecemburuan sosial, disharmoni, kriminal maupun disintegrasi yang dapat berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban



masyarakat.

Masyarakat lokal harus diberdayakan sedemikian rupa sehingga mampu menghidupi diri sendiri dan keluarganya sehingga mereka dapat berkontribusi dalam pembangunan IKN Nusantara. Jangan sampai mereka menjadi pribadi-pribadi yang terkorbankan oleh kemajuan pembangunan akibat dari ketidakmampuan mereka. Pada tahap awal harus dipastikan mereka terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang dan papan, kemudian dikembangkan kemampuannya secara bertahap untuk dapat mengejar ketertinggalan dengan masyarakat pendatang baru di IKN Nusantara; dimana mereka yang datang dari unsur pemerintahan pusat dari Jakarta lebih mampu dan maju dalam kehidupannya. Hal ini sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat (*community empowerment theory*) yang menekankan adanya sebuah proses yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam usaha meningkatkan kapasitas dan kemandirian mereka dalam mengambil keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. (Suharto,2005).

Disinilah urgensi/pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal harus dilakukan sejak dini, komprehensif dan didukung oleh dana yang memadai bersamaan dengan pembangunan fisik IKN Nusantara. Pemberdayaan masyarakat jangan dianggap sepele karena kondisi ketertinggalan yang berkepanjangan tanpa solusi yang tepat dan cepat akan menjadi “bom waktu” yang setiap saat dapat meledak menjadi permasalahan multi

dimensional.

Dari uraian tersebut, dapat diidentifikasi bahwa faktor-faktor yang mendukung implementasi pemberdayaan masyarakat lokal perspektif keamanan dan ketertiban masyarakat di IKN Nusantara adalah a) semangat juang dan kerja keras; b) semangat gotong royong; c) budaya dan kearifan lokal. Sedangkan faktor-faktor yang menghambatnya adalah a) latar belakang pendidikan rendah; b) tingkat sosial dan ekonomi lemah; dan c) tingkat kesehatan yang rendah; dan d) sumber daya dan keuangan yang tidak memadai. Dan juga dipengaruhi oleh a) efektivitas komunikasi; b) kemampuan mengelola sumber daya; c) kepemimpinan; d) partisipasi masyarakat lokal; dan e) tingkat keberhasilan pasca mengikuti program pemberdayaan masyarakat.

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa :

- a. Pemberdayaan masyarakat lokal perspektif keamanan dan ketertiban masyarakat di IKN Nusantara sangat urgen atau penting dan mendesak untuk dilakukan oleh Badan Otorita IKN Nusantara bermitra dengan semua pemangku kepentingan. Adapun jenis-jenis program pemberdayaan masyarakat lokal yang dapat dilakukan mencakup : a) aspek mental ideologi nasional ; b) aspek ketrampilan; c) aspek permodalan; d) aspek kesehatan dan e) aspek keamanan dan ketertiban masyarakat.

- b. Upaya-upaya melakukan pemberdayaan masyarakat lokal perspektif keamanan dan ketertiban masyarakat di KN Nusantara meliputi : a) *skilling empowerment*; b) *upskilling empowerment*; dan c) *reskilling empowerment*.
- c. Faktor-faktor yang mendukung implementasi pemberdayaan masyarakat lokal perspektif keamanan dan ketertiban masyarakat di IKN Nusantara adalah a) semangat juang dan kerja keras; b) semangat gotong royong; c) budaya dan kearifan lokal. Sedangkan faktor-faktor yang menghambatnya adalah a) latar belakang pendidikan rendah; b) tingkat sosial dan ekonomi lemah; dan c) tingkat kesehatan yang rendah; dan d) sumber daya dan keuangan yang tidak memadai. Dan juga dipengaruhi oleh a) efektivitas komunikasi; b) kemampuan mengelola sumber daya; c) kepemimpinan; d) partisipasi masyarakat lokal; dan tingkat keberhasilan pasca mengikuti program pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan simpulan di atas, dapat direkomendasikan kepada para pihak sebagai berikut:

a) Pemerintah/Badan Otorita IKN Nusantara :

- 1) Menyiapkan dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat lokal secara komprehensif berbasis pada kebutuhan riil masyarakat lokal saat ini maupun proyeksi ke depan kebutuhan yang diperlukan dalam pembangunan IKN Nusantara, sehingga mereka memiliki ketrampilan

yang memadai dalam berkontribusi dalam pembangunan IKN Nusantara.

- 2) Menyiapkan dan melaksanakan program kebijakan keberpihakan (*affirmative policy*), terutama memberdayakan masyarakat lokal untuk mengejar ketertinggalannya.
  - 3) Menjalin kemitraan strategis dengan para pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat lokal agar lebih efektif dan efisien.
- b) Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)
- 1) Menciptakan dan memelihara kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif sebagai prasyarat jalannya proses pembangunan nasional.
  - 2) Menjalin kemitraan strategis bidang kamtibmas dengan semua pemangku kepentingan demi terwujudnya kondisi kamtibmas yang kondusif maupun ketahanan nasional yang tangguh.
- c) Pemerintah Daerah
- 1) Melakukan sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan dengan program pemberdayaan yang disiapkan oleh Badan Otorita IKN Nusantara agar tidak terjadi duplikasi program sehingga lebih efektif dan efisien.
  - 2) Melakukan kerja sama dengan Badan Otorita IKN Nusantara maupun para

pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di wilayah IKN Nusantara.

- d) Masyarakat Lokal di IKN Nusantara
- 1) Berpikir positif dan mempersiapkan diri lahir dan batin dalam menghadapi perubahan dengan adanya pembangunan IKN Nusantara.
  - 2) Berpartisipasi aktif dalam mengikuti program pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya demi kebaikan diri, keluarga dan masyarakat.
  - 3) Memberikan dukungan kepada Pemerintah/Badan Otorita IKN Nusantara agar pembangunan berlangsung aman sehingga dapat mensejahterakan rakyat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- UUD NRI 1945 ( Cita-cita dan Tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945).
- UU No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.
- UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No.59 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No.62 Tahun 2022 Tentang Otorita Ibu Kota Nusantara.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No.63 Tahun 2022 Tentang Rincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No.64 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042.
- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. PT Grafindo Persada, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi 2011, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Ed.Rev.VI.Cet.1, Jakarta, Rineka Cipta.
- Battyl, M. 2012, Smart City of the Future, The European Physical Journal Special Topic, pg 496. (diakses tanggal 4 Februari 2023, Pukul 20.00 WIB).
- Chambers, R. 1985. *Rural Development Putting The Last First*. London ; New York.
- Darmakusuma, H., dkk. 2023, *Kepemimpinan*, Jakarta, Lemhannas RI.
- Depdiknas. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka. Jakarta.
- Dewi, Maulida R, dkk. 2020. Analisis Kesiapan Masyarakat Kecamatan Sepaku dan Samboja Terhadap Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota Vol.16 No 4*. H. 300-313. (<https://ejournal.undip.ac.id> diakses tanggal

- 3 Februari 2023, Pukul 22.25 WIB).
- Forest Watch Indonesia 2014, *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013*, FWI, Jakarta.
- Hadinagoro, Suharyono S. (2019), *Perkokoh Ke-Indonesia-an Kita, Indonesia-an Kita*, Deepublish.Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2020, Analisis Dampak Pindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur Terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur, *Disertasi*, FEB, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Hadiningrat, Suharyono S. 2022. *Pemindahan Ib Kota Negara Paradigma Pembangunan Berkelanjutan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Mulyono, Hari, dkk, 2023, *Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional*, Jakarta, Lemhannas RI.
- Pidato Presiden Joko Widodo dalam Ulang Tahun ke-50 Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAPI), April 2021.
- Pramadi, Noor, dkk. 2023, *Pancasila dan UUD NRI 1945*, Jakarta, Lemhannas RI.
- Prabowo, Estu, dkk. 2019, *Geopolitik dan Wawasan Nusantara*, Jakarta, Lemhannas RI.
- Rosmedi dan Risyanti, Riza. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Alqaprit Jatinegoro. Sumedang.
- Setiyono, Yoyok Yekti, dkk. 2023, *Sistem Manajemen Nasional*, Jakarta, Lemhannas RI.
- Soekanto, Soerjono. 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cetakan ke-2 Rajawali Press. Jakarta.
- Soemarwoto, Suharyono 2018, *Catatan Penting Ke-Indonesia-an Kita Jilid 1*, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2018, *Catatan Penting Ke-Indonesia-an Kita Jilid 2*, Yogyakarta, Deepublish.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. Cetakan ke-1. Ravika Aditama. Bandung.
- Suparmoko, M. Dkk. 2014, *Pokok-Pokok Ekonomika*, Edisi 3, In Media. Bogor.
- Tarigan, Robinson 2014, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, Jakarta, PT.Bumi Aksara.
- Terry, George R. dan Rul, Leslie W. 1999. *Dasar-dasar Manajemen*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Triwidodo, Ibnu, dkk. 2023, *Kewaspadaan Nasional*, Lemhannas RI.
- Usman, Wan 2003, *Daya Tahan Bangsa, Program Studi Ketahanan Nasional Pascasarjana*, Unibersitas Indonesia, Jakarta.
- Wilson, Terry. 1996. *The Empowerment Manual*, Grower Publishing Company. London.
- <https://bappenas.go.id> (diakses tanggal 4 Februari 2023)
- <https://sdgs.bappenas.go.id> (diakses tanggal 4 Februari 2023)
- <https://bps.go.id> (diakses tanggal 4 Februari 2023)
- <https://www.lemhannas.go.id> (diakses tanggal 4 Februari 2023)
- <http://lib.lemhannas.go.id> (diakses tanggal 4 Februari 2023)
- <https://ppukab.bps.go.id/> (diakses tanggal 3 Februari 2023,)
- <https://kukarkab.bps.go.id> (diakses tanggal 3 Februari 2023)
- <https://kajiannawacita.org> (diakses tanggal 4 Februari 2023)
- [www.impinews.com](http://www.impinews.com)(diakses tanggal 4 Februari 2023 )